

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali di kota-kota besar di Indonesia disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi dan kelahiran yang tidak terkendali. Berdasarkan data BPS tahun 2012-2017 jumlah urbanisasi selama periode lima tahun 49,8% dari jumlah penduduk perkotaan dan tingkat kelahiran 90,1 Juta.

Tingginya arus urbanisasi dan kelahiran yang terjadi saat ini tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan permukiman-permukiman baru, sehingga para pendatang dan masyarakat tidak mampu, akan mencari alternatif untuk tetap tinggal diperkotaan termasuk tinggal di suatu permukiman tidak layak huni yang semakin lama berkembang membentuk permukiman kumuh, Taufik (2019).

Pemukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. (UU No.04 pasal 22 tahun 1992).

Berbagai upaya dilakukan pemerintah kota untuk menangani masalah-masalah permukiman kumuh tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Saat ini pemerintah mencanangkan upaya mengentaskan permukiman kumuh melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan

permukiman kumuh menjadi 0 (nol) hektar dari 38.431Ha melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program Kotaku merupakan upaya strategis Ditjen Jendral Cipta Karya (DJCK) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia, serta mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Arah Kebijakan Program Kotaku adalah membangun infrastruktur permukiman Skala Kawasan sehingga diharapkan dapat mengubah wajah kawasan permukiman. (PUPR, 2019).

Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019). Kota Solok dan Kota Padang merupakan salah satu Kota yang melaksanakan program tersebut. Melalui Surat Keputusan Walikota Solok Nomor. 188,45-654/2014 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Kota Solok, di Kota Solok terdapat kawasan kumuh seluas 168,03 hektar, terdiri dari 8 kawasan kumuh di 11 Kelurahan. Begitu pula dengan Kota Padang juga melaksanakan program Kotaku, melalui Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 163/2014 tentang Penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Kota Padang, di Kota Padang terdapat kawasan kumuh seluas 107,96 hektar, terdiri dari 8 kawasan kumuh di 23 Kelurahan, (Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Nomor:40/SE/DC/2016).

Adapun jenis pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan program Kotaku sesuai dengan 7 aspek kumuh Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Nomor:40/SE/DC/2016 yaitu jalan lingkung dan drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, Ruang terbuka publik. Adapun jenis pembangunan yang sudah dikerjakan sepanjang tahun

2018 sampai 2019 di Kota Solok dan Kota Padang berdasarkan Laporan Realisasi Program KOTAKU (2017-2019) meliputi peningkatan jalan lingkung (jalan paving block, rabat beton), drainase lingkungan, septictank komunal, penyediaan tempat sampah 3R, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) 3R, penampungan air hujan (PAH), gorong-gorong, MCK, tembok penahan. (Realisasi Kegiatan Kotaku, 2018/2019).

Pelaksanaan program KOTAKU sepenuhnya dilimpahkan oleh pemerintahan kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif, dimana semua tanggung jawab dan kewenangan diberikan kepada masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga keberlanjutan dengan harapan semua masyarakat dapat berpartisipasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Dalam proses pelaksanaannya masyarakat didampingi oleh konsultan dan dukungan pemerintahan.

Kebhasilan atau kegagalan pelaksanaan program KOTAKU sangat ditentukan oleh kinerja dari pelaksana program yaitu pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yang dinilai sejauh mana para pelaksana program dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dalam kaitannya manerapkan fungsi manajemen dengan benar diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan tuntutan tugas dan wewenangnya.

Dari pelaksanaan kegiatan program ditemukan permasalahan-permasalahan dilapangan seperti kualitas pekerjaan yang masih relatif rendah, kuantitas pekerjaan tidak terpenuhi serta rendahnya kualitas pelaporan administrasi proyek dan pelaporan keuangan. Permasalahan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handika dkk (2020) yang berjudul "*Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota*" dan penelitian yang dilakukan

Vitri (2018) tentang : “*Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Program Pemberdayaan Di Provinsi Sumatera Barat*” terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program diantaranya : permasalahan administrasi, masalah mutu yang tidak sesuai, penyimpangan biaya dan pelaksanaan pekerjaan tidak selesai tepat waktu.

Berdasarkan laporan Audit BPKP pelaksanaan pekerjaan pada rentang tahun 2017-2019 untuk Kota Solok dan Kota Padang ditemui beberapa permasalahan seperti: Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pembayaran upah yang tidak didukung oleh bukti pertanggung jawaban, rendahnya mutu infrastruktur yang dibangun, terdapat kurang volume pekerjaan dari rencana, perubahan pekerjaan yang tidak didukung oleh administrasi yang memadai (*Change Contract Order*).

Rendahnya kualitas pekerjaan, penyimpangan biaya serta pelaksanaan administrasi yang tidak terkendali menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pekerjaan, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor diantaranya kurangnya kompetensi team leader dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan KAK Program Kotaku tugas Team Leader memberikan pendampingan kepada pelaksana kegiatan (masyarakat) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan penguatan kepada masyarakat untuk keberlanjutan program pasca pembangunan, melakukan koordinasi dengan semua stekholder dalam pelaksanaan pekerjaan, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan ditingkat kota kabupaten yang terdiri dari beberapa kelurahan serta melaksanakan fungsi manajemen dan pengorganisasian kegiatan program di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan permasalahan diatas perlu dilakukan penelitian tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang leader, maka dari itu peneliti mencoba

meneliti tentang:” **Kajian Kompetensi Team Leader Dalam Pelaksanaan Program KOTAKU Propinsi Sumatera Barat (Study Kasus Program KOTAKU di Kota Solok dan Kota Padang)**”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja kompetensi yang dibutuhkan oleh team leader dalam pelaksanaan program KOTAKU di Propinsi Sumatera Barat?
2. Apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Team Leader dalam pelaksanaan program KOTAKU di Propinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor kompetensi team leader yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Propinsi Sumatera Barat.
2. Merumuskan/mengembangkan langkah-langkah/upaya peningkatan kompetensi Team Leader dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Propinsi Sumatera Barat.

1.4 Batasan Penelitian

Agar topik pembahasan tidak meluas dengan batasan waktu yang tersedia relatif terbatas, maka untuk mencapai tujuan penelitian dibatasi hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan pada kompetensi Team Leader pelaksanaan program KOTAKU.

2. Penelitian ini dilakukan terhadap program KOTAKU yang telah dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 meliputi Kota Padang dan Kota Solok.
3. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Januari s/d 28 februari 2021
4. Responden dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Solok dan Kota Padang, Tekhnikal Managemen Konsultan, Team Koordinator Kota, Konsultan Management Wilayah, Konsultan Management Pusat, PPK-PPK, PPK-NSUP dan Masyarakat yang terlibat dalam program KOTAKU Propinsi Sumatera Barat 2018-2019.
5. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket/ kuesioner.
6. Nilai fisik program KOTAKU Rp.2.000.000.000 untuk Kota Solok, dan Rp.2.000.000.000 Kota Padang yang didanai oleh ISDB
7. Indikator keberhasilan program yang diteliti berfokus kepada dimensi kemampuan Team Leader dalam pelaksanaan program.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terutama bagi mereka yang menaruh minat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil variabel penelitian yang berbeda dan dengan pendekatan yang berbeda pula.
2. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan, khususnya mengenai kajian tentang kompetensi Team Leader.
3. Bagi Lembaga Desa dan Konsultan Managemen serta Satuan Kerja PKP , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti untuk

meningkatkan kinerja dan manajemen profesional dalam pelaksanaan Progra Kotaku di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar teoritis dalam pelaksanaan penelitian ini. Sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi baik dari buku, jurnal atau sumber lainnya khususnya yang berkaitan dengan Team Leder dan program KOTAKU.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan, populasi dan penentuan sample, sumber dan Teknik pengumpuln data serta pengumpulan variable

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan proses pengumpulan data hingga penyajiannya baik berupa tabulasi ataupun grafis yang dilengkapi dengan proses pembahasan sesuai tujuan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada tahap ini diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.